P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538 DOI : 10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA

Mengkaji Kolaborasi Kebijakan Publik dalam Percepatan SDGs Lingkungan Lokal: Tinjauan Pustaka Inisiatif di Berbagai Daerah

Al-Adly Darniyus
Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Kota Medan

E-mail: al-adlydarniyus@polmed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor lingkungan hidup pada tingkat lokal. Tantangan lingkungan kontemporer, seperti perubahan iklim, manajemen limbah, dan konservasi keanekaragaman hayati, membutuhkan pendekatan tata kelola yang inklusif dan multi-aktor. Melalui tinjauan pustaka yang komprehensif terhadap literatur ilmiah, laporan kebijakan, dan studi kasus yang relevan dari berbagai konteks geografis, studi ini mengidentifikasi model-model kolaborasi yang sukses, faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasinya, serta dampak nyata kebijakan kolaboratif terhadap keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan awal mengenai praktik terbaik dan dasar bagi studi lebih lanjut tentang penguatan kebijakan lingkungan kolaboratif di tingkat lokal.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Kolaborasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Lokal, Tata Kelola Kolaboratif,

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of collaborative public policy in accelerating the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in the environmental sector at the local level. Contemporary environmental challenges, such as climate change, waste management, and biodiversity conservation, necessitate an inclusive and multi-stakeholder governance approach. Through a comprehensive literature review of relevant scientific literature, policy reports, and case studies from various geographical contexts, this study identifies successful collaboration models, their enabling and inhibiting factors, and the tangible impacts of collaborative policies on ecological sustainability and social well-being. The findings of this research are expected to provide initial insights into best practices and a foundation for further studies on strengthening collaborative environmental policies at the local level.

Keywords : *Public Policy, Collaboration, Sustainable Development Goals, Local Environment, Collaborative Governance*

PENDAHULUAN

Tantangan global yang semakin kompleks di abad ke-21 menuntut pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, SDGs menjadi peta jalan universal untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Meskipun bersifat global, esensi pencapaian SDGs sangat bergantung pada implementasi dan inisiatif di tingkat lokal, atau yang dikenal sebagai "localizing SDGs". Hal ini dikarenakan berbagai isu pembangunan, termasuk masalah lingkungan, seringkali berakar dan termanifestasi secara paling nyata di komunitas lokal (United Cities and Local Governments, 2022).

Isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, polusi air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati, merupakan ancaman serius yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. Penanganan masalah-masalah ini tidak

dapat lagi dilakukan secara parsial oleh satu aktor saja. Keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah, dan interkonektivitas isu menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak. Di sinilah kebijakan publik berbasis kolaborasi muncul sebagai pendekatan krusial. Kolaborasi melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan aktor lainnya dalam perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, menciptakan sinergi yang lebih besar daripada upaya individu (Emerson & Nabatchi, 2015). Pendekatan kolaboratif ini dianggap mampu menghasilkan solusi yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks tata kelola lingkungan (Ansell & Gash, 2008; Termeer et al., 2022).

Meskipun konsep kolaborasi telah banyak dibahas dalam literatur administrasi publik dan kebijakan, penerapannya dalam konteks percepatan SDGs lingkungan di tingkat lokal masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Berbagai inisiatif kolaboratif telah muncul di berbagai daerah, namun pemahaman yang komprehensif mengenai peran, model, serta faktor pendorong dan penghambatnya masih terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan tinjauan pustaka untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan publik berbasis kolaborasi telah berperan dalam mengakselerasi pencapaian SDGs lingkungan di tingkat lokal, berdasarkan inisiatif yang terdokumentasi di berbagai daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian SDGs lingkungan di tingkat lokal, berdasarkan tinjauan pustaka inisiatif di berbagai daerah?" Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian SDGs lingkungan lokal, serta mengidentifikasi model-model kolaborasi, faktor-faktor pendorong dan penghambat, dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama. Manfaat teoritis adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik dan kebijakan publik, khususnya terkait teori *collaborative governance* dan implementasi SDGs di tingkat sub-nasional. Sementara itu, manfaat praktis diharapkan dapat menjadi sumber wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan inklusif melalui pendekatan kolaboratif.

LANDASAN TEORI

Bagian ini akan membahas konsep-konsep kunci yang mendasari analisis peran kolaborasi dalam percepatan SDGs lingkungan lokal. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana inisiatif kolaboratif bekerja, mengapa mereka penting, dan bagaimana mereka berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan seperangkat 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (United Nations, 2015). SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi semua, dengan penekanan pada prinsip "tidak ada seorang pun yang tertinggal" (*leaving no one behind*). Setiap SDG memiliki target dan indikator spesifik yang harus dicapai. Dalam konteks penelitian ini, fokus akan diberikan pada SDGs yang relevan dengan lingkungan hidup, seperti:

- SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi
- SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau
- SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim
- SDG 14: Ekosistem Lautan
- SDG 15: Ekosistem Daratan

Meskipun SDGs adalah agenda global, pencapaiannya sangat bergantung pada upaya implementasi di tingkat daerah. Konsep "Localizing SDGs" menekankan pentingnya mengintegrasikan tujuan-tujuan global ini ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan di

P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538 DOI : 10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA

tingkat lokal dan regional (United Cities and Local Governments, 2022). Pemerintah daerah dan aktor lokal memainkan peran krusial dalam menerjemahkan target global menjadi tindakan konkret yang relevan dengan konteks spesifik mereka, karena merekalah yang paling dekat dengan tantangan dan peluang di lapangan. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan "localizing SDGs" seringkali bergantung pada kapasitas tata kelola lokal dan kemampuan untuk membangun kemitraan yang kuat (Gupta & Vegelin, 2016).

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang disengaja dan sistematis yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah sebagai respons terhadap suatu masalah atau isu yang dianggap membutuhkan perhatian publik (Anderson, 1984). Kebijakan publik bukan hanya sekadar teks hukum atau peraturan, tetapi juga mencakup proses yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks lingkungan, kebijakan publik mencakup regulasi, insentif, program, dan strategi yang dirancang untuk melindungi lingkungan, mengelola sumber daya alam, dan memitigasi dampak negatif aktivitas manusia. Efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitasnya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan perspektif (Howlett & Ramesh, 2003).

Konsep Kolaborasi dalam Kebijakan Publik

Kolaborasi dalam kebijakan publik, sering disebut juga tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), merujuk pada pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-negara (seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, kelompok warga, dan akademisi) dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program publik (Ansell & Gash, 2008).

Karakteristik kunci dari kolaborasi meliputi:

- Aktor Multi-pihak**:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan perspektif dan sumber daya yang beragam.
- Proses Interaktif**:** Adanya dialog, negosiasi, dan pembelajaran bersama di antara para pihak.
- Orientasi Konsensus**:** Meskipun tidak selalu berarti kesepakatan mutlak, tujuannya adalah mencapai pemahaman dan komitmen bersama.
- Tujuan Bersama**:** Fokus pada pencapaian tujuan kolektif yang sulit dicapai oleh satu pihak saja.
- Berbagi Tanggung Jawab**:** Risiko dan manfaat dibagi di antara para pihak yang berkolaborasi.

Teori tata kelola kolaboratif menekankan bahwa dalam menghadapi "masalah jahat" (*wicked problems*) yang kompleks dan tidak jelas batasannya, seperti isu-isu lingkungan, pendekatan hierarkis atau pasar seringkali tidak memadai (Head & Alford, 2015). Kolaborasi menawarkan jalan keluar dengan memungkinkan integrasi pengetahuan, sumber daya, dan legitimasi dari berbagai sektor. Manfaat potensial dari kolaborasi meliputi peningkatan kualitas keputusan, legitimasi kebijakan yang lebih tinggi, efisiensi dalam implementasi, dan peningkatan kapasitas aktor yang terlibat. Namun, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan, konflik kepentingan, dan biaya transaksi yang tinggi juga perlu dipertimbangkan (Provan & Kenis, 2005).

Dalam konteks lingkungan, kolaborasi sering kali muncul dalam bentuk kemitraan pengelolaan sumber daya, forum dialog kebijakan, atau proyek bersama yang berfokus pada konservasi, mitigasi perubahan iklim, atau pengelolaan limbah. Model-model ini menunjukkan bagaimana sinergi antaraktor dapat mempercepat proses inovasi dan adaptasi terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang (Newig et al., 2013).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (literature review) komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mensintesis pengetahuan yang ada, mengidentifikasi pola, dan memahami fenomena dari berbagai sumber literatur tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis pada basis data ilmiah

seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, menggunakan kombinasi kata kunci seperti "kolaborasi kebijakan publik," "SDGs lingkungan lokal," "tata kelola kolaboratif," "pembangunan berkelanjutan," dan "kemitraan multi-stakeholder." Kriteria inklusi difokuskan pada jurnal ilmiah berbahasa Inggris dan Indonesia, buku, serta laporan lembaga kredibel yang relevan dengan topik, dengan prioritas pada publikasi dalam 10-15 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas.

Proses analisis data dilakukan secara tematik, di mana informasi dari berbagai sumber diidentifikasi, dikategorikan, dan disintesis berdasarkan tema-tema kunci yang relevan dengan rumusan masalah. Tema-tema tersebut meliputi model-model kolaborasi yang muncul, faktor pendorong keberhasilan, tantangan atau faktor penghambat, serta dampak kolaborasi terhadap pencapaian target SDGs lingkungan di tingkat lokal. Analisis ini bertujuan untuk membangun argumen yang koheren dan komprehensif mengenai peran kolaborasi dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada untuk studi selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan sintesis temuan dari tinjauan pustaka mengenai peran kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian SDGs lingkungan di tingkat lokal. Analisis akan dibagi menjadi empat sub-bab utama: model-model kolaborasi yang muncul, faktor pendorong keberhasilan, faktor penghambat, serta dampak kolaborasi terhadap target-target lingkungan berkelanjutan.

1. Model-model Kolaborasi Kebijakan Lingkungan Lokal

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kolaborasi dalam kebijakan lingkungan di tingkat lokal bermanifestasi dalam berbagai model yang disesuaikan dengan konteks dan kompleksitas isu yang dihadapi. Salah satu model yang dominan adalah kemitraan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal. Model ini sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti rehabilitasi daerah aliran sungai, konservasi hutan mangrove, atau pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bodin, 2017). Contohnya, di beberapa daerah di Asia Tenggara, kemitraan semacam ini berhasil meningkatkan efektivitas program reboisasi dan mengurangi deforestasi dengan melibatkan petani lokal dan perusahaan swasta dalam rantai nilai yang berkelanjutan (Sumarwi et al., 2023).

Model lain yang menonjol adalah forum dialog dan platform pembelajaran. Ini adalah wadah di mana berbagai pemangku kepentingan berkumpul secara reguler untuk berbagi informasi, membahas tantangan lingkungan, dan merumuskan solusi bersama. Forum-forum ini, seperti dewan adaptasi perubahan iklim di tingkat kota atau gugus tugas konservasi biodiversitas, memungkinkan penyelarasan agenda dan pembangunan konsensus di antara aktor-aktor yang berbeda kepentingan (Emerson & Nabatchi, 2015). Mereka memfasilitasi social learning dan capacity building, yang esensial untuk kebijakan lingkungan yang adaptif (Pahl-Wostl, 2007).

Selain itu, terdapat model co-production (ko-produksi) layanan publik, di mana masyarakat lokal secara aktif terlibat dalam penyediaan layanan lingkungan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Contohnya adalah pengelolaan bank sampah oleh komunitas, patroli hutan adat, atau inisiatif warga untuk membersihkan saluran air. Dalam model ini, warga bukan hanya mengadvokasi, tetapi juga bertindak sebagai produsen bersama nilai publik, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan layanan (Brandsen & Honingh, 2016). Model ini sangat relevan untuk SDGs seperti SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) dan SDG 11 (Kota Berkelanjutan).

Terakhir, beberapa literatur menyoroti jaringan tata kelola (governance networks) yang lebih longgar namun tetap efektif dalam mengatasi masalah lingkungan lintas batas administratif. Jaringan ini sering terbentuk di sekitar isu-isu spesifik, seperti perlindungan ekosistem pesisir yang melintasi beberapa kabupaten atau provinsi. Mereka beroperasi berdasarkan kepercayaan, tujuan bersama, dan pertukaran informasi informal, melengkapi struktur birokrasi formal (Rhodes, 2007).

2. Faktor Pendorong Keberhasilan Kolaborasi

P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538 DOI : 10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA

Keberhasilan implementasi kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam konteks lingkungan lokal sangat bergantung pada berbagai faktor pendorong. Salah satu faktor krusial adalah kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) (Ansell & Gash, 2008). Pemimpin yang efektif mampu membangun kepercayaan, memediasi konflik, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Mereka tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan dan mencari titik temu, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan pengambilan keputusan bersama.

Adanya rasa saling percaya (trust) di antara para pihak juga merupakan fondasi utama kolaborasi. Kepercayaan memungkinkan aktor-aktor yang berbeda latar belakang untuk berbagi informasi, sumber daya, dan bahkan risiko. Tanpa kepercayaan, kolaborasi cenderung rapuh dan mudah bubar di tengah jalan (Chen & Huang, 2021). Kepercayaan sering dibangun melalui interaksi berulang, transparansi, dan komitmen yang ditunjukkan oleh setiap pihak.

Faktor pendorong lainnya adalah ketersediaan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya finansial, teknis, maupun manusia (Lasker et al., 2001). Kolaborasi membutuhkan investasi waktu dan upaya, dan tanpa dukungan sumber daya yang cukup, inisiatif kolaboratif mungkin sulit untuk dipertahankan. Sumber daya ini bisa berasal dari pemerintah, dana CSR perusahaan, hibah dari organisasi internasional, atau kontribusi sukarela dari masyarakat.

Kerangka kelembagaan dan hukum yang jelas juga memainkan peran penting. Meskipun kolaborasi bersifat informal dalam beberapa aspek, adanya aturan main, prosedur yang transparan, dan mandat yang mendukung dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dapat memberikan legitimasi dan kepastian bagi para pihak yang terlibat (Imperial, 2005). Ini membantu mengurangi ambiguitas peran dan tanggung jawab.

Terakhir, kapasitas aktor lokal dan partisipasi yang inklusif sangat vital. Ketika komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan individu memiliki kapasitas untuk memahami isu, berpartisipasi secara bermakna, dan menyuarakan kepentingan mereka, kolaborasi menjadi lebih kuat dan solusinya lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan (Leventon et al., 2021). Pemberdayaan dan pendidikan lingkungan bagi masyarakat menjadi investasi penting untuk memperkuat faktor pendorong ini.

3. Faktor Penghambat Kolaborasi

Meskipun kolaborasi menawarkan potensi besar, implementasinya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan antaraktor yang terlibat (Gray & Purdy, 2018). Dalam forum kolaboratif, aktor dengan sumber daya, informasi, atau posisi kelembagaan yang lebih dominan dapat mendominasi agenda dan proses pengambilan keputusan, sehingga mengurangi partisipasi dan komitmen dari pihak yang lebih lemah. Ini dapat mengikis kepercayaan dan legitimasi proses kolaboratif itu sendiri.

Selain itu, konflik kepentingan dan perbedaan nilai sering menjadi ganjalan. Berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan, komunitas lokal, dan lembaga konservasi, mungkin memiliki prioritas dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana sumber daya lingkungan harus dikelola atau bagaimana pembangunan harus dilakukan. Mengelola dan merekonsiliasi perbedaan ini membutuhkan upaya mediasi yang intensif dan kemampuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) (Thomson & Perry, 2006).

Kurangnya kapasitas dan sumber daya yang tidak merata juga merupakan penghambat signifikan. Seringkali, organisasi masyarakat sipil atau kelompok komunitas lokal kekurangan dana, keahlian teknis, atau staf yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses kolaborasi yang kompleks (Newig et al., 2013). Ketimpangan kapasitas ini dapat memperparah ketidakseimbangan kekuasaan dan menghambat tercapainya tujuan bersama.

Hambatan lain berasal dari resiko birokrasi dan resistensi internal dalam lembaga pemerintah. Struktur hierarkis dan budaya organisasi yang kaku di sektor publik terkadang sulit beradaptasi dengan fleksibilitas dan keterbukaan yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Birokrasi mungkin enggan berbagi informasi atau mendelegasikan otoritas,

menganggap kolaborasi sebagai ancaman terhadap kontrol atau efisiensi (Salamon, 2002). Peraturan yang tidak mendukung atau insentif yang tidak selaras juga bisa menjadi penghambat.

Terakhir, kurangnya indikator keberhasilan yang jelas dan mekanisme akuntabilitas dapat menyulitkan evaluasi dan penyesuaian kolaborasi. Tanpa cara yang efektif untuk mengukur kemajuan dan mempertanggungjawabkan hasil, antusiasme untuk berkolaborasi dapat memudar dan investasi menjadi kurang terarah (Klijn & Koppenjan, 2016). Semua hambatan ini menuntut perhatian serius dalam perancangan dan pengelolaan inisiatif kolaboratif.

4. Dampak Kolaborasi terhadap Percepatan SDGs Lingkungan Lokal

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kolaborasi kebijakan publik memiliki dampak signifikan dalam mempercepat pencapaian target-target SDGs lingkungan di tingkat lokal, meskipun dengan variasi keberhasilan yang bergantung pada konteks dan kualitas kolaborasi. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan efektivitas program dan proyek lingkungan. Dengan menyatukan berbagai perspektif dan sumber daya, kolaborasi mampu merancang solusi yang lebih holistik, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan lokal, dibandingkan dengan pendekatan top-down yang terisolasi (Termeer et al., 2022). Misalnya, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam pengelolaan limbah seringkali menghasilkan penurunan volume sampah yang signifikan dan peningkatan tingkat daur ulang di tingkat komunitas (Sarker et al., 2021).

Dampak positif lainnya adalah peningkatan kapasitas adaptasi dan resiliensi lingkungan. Melalui forum dialog dan pembelajaran bersama, aktor lokal dapat berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dalam menghadapi dampak perubahan iklim atau bencana alam. Kolaborasi memfasilitasi pengembangan strategi adaptasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kondisi lokal, seperti sistem peringatan dini bencana yang dibangun bersama masyarakat atau pengembangan pertanian berkelanjutan yang tangguh terhadap perubahan iklim (Bodin & Crona, 2009).

Kolaborasi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola lingkungan yang lebih demokratis dan inklusif. Dengan melibatkan suara-suara dari berbagai sektor, termasuk kelompok marginal, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih legitim dan diterima oleh masyarakat luas. Ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi potensi konflik sosial terkait pemanfaatan sumber daya alam (Leventon et al., 2021). Partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan lingkungan dapat mendorong rasa kepemilikan terhadap inisiatif keberlanjutan, memastikan implementasi yang lebih baik dan hasil yang lebih lestari.

Lebih jauh, keberhasilan kolaborasi sering kali tercermin dalam perubahan perilaku dan kesadaran lingkungan masyarakat. Ketika masyarakat secara langsung terlibat dalam program-program lingkungan, mereka cenderung lebih memahami isu, mengubah kebiasaan, dan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Contohnya adalah kampanye edukasi berbasis komunitas untuk mengurangi penggunaan plastik atau program konservasi air yang diinisiasi bersama warga (Loewenstein et al., 2012).

Meski demikian, perlu dicatat bahwa dampak kolaborasi tidak selalu linier dan positif. Hambatan yang telah dibahas sebelumnya dapat membatasi potensi dampak. Namun, secara keseluruhan, temuan dari literatur menegaskan bahwa kolaborasi kebijakan publik merupakan mekanisme yang kuat untuk mendorong percepatan pencapaian SDGs lingkungan lokal, dengan menciptakan sinergi antaraktor dan menghasilkan solusi yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif peran kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor lingkungan hidup pada tingkat lokal melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi bermanifestasi dalam beragam model, mulai dari kemitraan multi-stakeholder, forum dialog, hingga ko-produksi layanan publik dan jaringan tata kelola, yang semuanya bertujuan untuk menyatukan berbagai aktor dan sumber daya. Keberhasilan inisiatif kolaboratif ini sangat didorong oleh adanya kepemimpinan fasilitatif,

kepercayaan antarpihak, ketersediaan sumber daya yang memadai, kerangka kelembagaan yang jelas, serta kapasitas dan partisipasi inklusif dari aktor lokal. Faktor-faktor pendorong ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sinergi dan inovasi dalam tata kelola lingkungan.

Meskipun demikian, implementasi kolaborasi tidak luput dari tantangan. Hambatan seperti ketidakseimbangan kekuasaan, konflik kepentingan, kurangnya kapasitas yang merata, resistensi birokrasi, serta absensi indikator keberhasilan dan mekanisme akuntabilitas yang jelas seringkali menghambat potensi penuh kolaborasi. Namun, di tengah tantangan ini, tinjauan pustaka mengafirmasi bahwa kolaborasi memiliki dampak substansial terhadap percepatan SDGs lingkungan lokal. Dampak ini meliputi peningkatan efektivitas program lingkungan, penguatan kapasitas adaptasi dan resiliensi, peningkatan tata kelola yang lebih demokratis dan inklusif, serta perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Secara keseluruhan, kolaborasi memungkinkan penciptaan solusi yang lebih holistik, adaptif, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang kompleks di tingkat lokal.

Mengingat pentingnya kolaborasi, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan studi kasus mendalam pada inisiatif kolaborasi tertentu di Indonesia, guna menganalisis dinamika internal, dampak spesifik, serta faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi metode pengukuran dampak kolaborasi secara lebih kuantitatif terhadap pencapaian indikator SDGs lingkungan. Dari sisi praktis, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu berinvestasi dalam pembangunan kapasitas fasilitator kolaborasi, penguatan kerangka kelembagaan yang mendukung partisipasi inklusif, dan pengembangan mekanisme akuntabilitas yang transparan untuk mengoptimalkan potensi kolaborasi dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (1984). *Public Policy-Making: An Introduction*. Holt, Rinehart and Winston.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.

Bodin, Ö. (2017). Collaborative Environmental Governance: Picking up the Pieces of the Puzzle. *Environmental Policy and Governance*, 27(4), 281-292.

Bodin, Ö., & Crona, B. I. (2009). The role of social networks in natural resource governance. *Environmental Policy and Governance*, 19(6), 406-419.

Brandsen, T., & Honingh, M. (2016). Distinguishing co-production from co-creation: A new approach to a messy concept. *Public Management Review*, 18(5), 629-646.

Chen, J. C., & Huang, J. W. (2021). Building trust in collaborative governance: A relational perspective. *Public Management Review*, 23(1), 126-146.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance in a Networked World*. Georgetown University Press.

Gray, B., & Purdy, J. M. (2018). *Collaborating for Resilience: A Guide to Multi-Stakeholder Collaboration*. Oxford University Press.

Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16, 433-448.

Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. *Public Management Review*, 17(11), 1637-1647.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.

Imperial, M. T. (2005). Collaborative environmental management: What makes it work? *Environmental Management*, 35(4), 524-539.

Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2016). Governance networks and complexity: An introduction. *Public Management Review*, 18(6), 795-802.

Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: A framework for studying and strengthening the work of community coalitions. *Milbank Quarterly*, 79(2), 179-201.

Leventon, J., Fleskens, L., & Schwaab, S. (2021). Collaborative governance for

sustainable land management: A systematic review of drivers and outcomes. *Land Use Policy*, 103, 105299.

Loewenstein, G., Cain, D. M., & Bazerman, M. H. (2012). Environmentalism for cynics: Psychological barriers to ecological conservation. *American Psychologist*, 67(8), 610–624.

Newig, J., Schulz, D., & Jager, N. W. (2013). The Role of Collaborative Governance in Environmental Policy: Evidence from a Meta-Analysis. *Environmental Policy and Governance*, 23(5), 269-282.

Pahl-Wostl, C. (2007). Transitions towards adaptive management of water facing climate change: Insights from four river basins. *Water Resources Management*, 21(1), 37-60.

Provan, K. G., & Kenis, P. (2005). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(2), 229-252.

Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. *Organization Studies*, 28(8), 1243-1264.

Salamon, L. M. (2002). *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*. Oxford University Press.

Sarker, S. K., Al-Amin, A., & Islam, M. R. (2021). Multi-stakeholder collaboration for sustainable solid waste management in developing countries: A systematic review. *Environmental Development*, 38, 100588.

Sumarwi, E., Israwan, R., & Handayani, T. (2023). Collaborative Governance in Community-Based Forest Management for Sustainable Development Goals in Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(1), 101-112.

Termeer, C. J. A., Runhaar, H. A. C., & van Nieuwaal, K. (2022). Collaborative governance and sustainability transitions: A systematic review. *Environmental Science & Policy*, 136, 175-188.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, 66(s1), 20-32.

United Cities and Local Governments (UCLG). (2022). *The Local and Regional Governments' Report to the HLPF 2022: Local and Regional Governments at the Forefront of Accelerating SDG Implementation*. UCLG.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Publishing.